

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pengembangan kemampuan profesional guru secara umum telah dilaksanakan secara rutin, misalnya: setelah apel tiap tanggal 17 selalu diadakan rapat, pemberian informasi penting dan pembinaan secara langsung dari kepala sekolah terhadap guru-guru dan tenaga tata usaha.
Pengembangan kemampuan Guru pendidikan Agama Islam secara khusus oleh kepala sekolah mendapat prioritas utama dan tidak dibedakan dengan guru bidang studi yang lain, kepala sekolah memberikan motivasi, peluang dan dukungan moril maupun materil apabila terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan kemampuan guru pendidikan agama Islam seperti : mengikutsertakan penataran PWKGAI yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Tingkat Propinsi maupun Tingkat Daerah, mengikutsertakan dalam kegiatan seminar atau diskusi ilmiah yang diselenggarakan oleh instansi-instansi lain, memberikan izin untuk mengikuti studi lanjut dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang bersifat pengembangan atau peningkatan mutu.

Dan adanya pengakuan dari kepala sekolah bahwa pengawas pendidikan agama Islam dalam membina para GPAI nampaknya belum dilaksanakan secara kontinyu, hal ini didasarkan kepada kehadiran pengawas ke sekolah binaannya hanya pada waktu-waktu tertentu seperti tahun ajaran baru, waktu tes sumatif (catur wulan) dan waktu pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir (ebta).

2. Pembinaan kemampuan guru pendidikan agama Islam yang sering dilakukan adalah kunjungan ke sekolah, mendiskusikan permasalahan pengajaran agama Islam dengan GPAI dan kepala sekolah dan sewaktu-waktu menjadi instruktur dalam kegiatan penataran / pelatihan.

Para pengawas memahami terhadap tugasnya sebagai supervisor pengajaran yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap para guru agama yang bertugas di SLTP, SMU, Pembinaan secara administratif dan edukatif terhadap para guru di sekolah-sekolah tingkat menengah dan atas yang berada di lingkungan Departemen Agama.

Hasil yang lain dari penelitian tentang kegiatan pengawas PAI dalam pembinaan kemampuan GPAI antara lain seperti berikut :

- a. Secara ideal harapan para pengawas, bahwa para guru pendidikan agama selain menguasai landasan-landasan kependidikan, juga diharapkan dapat memiliki sifat-sifat kepribadian sebagai muslim yang bertakwa kepada Allah SWT dan sebagai warga negara Indonesia serta cendekia dan mampu mengembangkannya.
- b. Adanya pengakuan dari para guru pendidikan agama ber-NIP 13 dan NIP 15 bahwa mereka belum mendapatkan pembinaan secara maksimal dari para pengawas PAI yang ditugaskan di wilayah Kotamadya Cirebon. Para guru agama mengaku merasa dibina dan dibesarkan oleh kepala sekolah.
- c. Salah satu akibat dari kurang adanya pembinaan secara sistematis dan kontinu dari pengawas PAI, maka terdapat pengakuan dari sebagian GPAI NIP 13 bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan dengan Departemen Agama.
- d. Para Guru agama yang ditugaskan di SMU negeri termasuk yang ber-NIP 15 mengakui bahwa kegiatan pengembangan kemampuan GPAI mereka ikuti melalui penataran PWKGI yang dilaksanakan di tingkat propinsi maupun di daerah, seminar dan diskusi yang berkaitan dengan pengajaran agama Islam yang dilakukan oleh instansi lain, pengembangan

secara pribadi dan ada sebagian yang mengikuti studi lanjut.

- e. Para pengawas nampaknya belum membuat program secara matang dalam memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap GPAI, sehingga kehadiran pengawas ke sekolah yang dibinanya seakan-akan pada saat ada permasalahan yang dihadapi oleh GPAI.
 - f. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini nampaknya bermuara pada : koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dalam peningkatan mutu GPAI belum maksimal, dan belum jelasnya batas dan wewenang pejabat fungsional di lingkungan Departemen Agama dalam melaksanakan supervisi terhadap GPAI NIP 13 di sekolah-sekolah umum.
3. Bentuk-bentuk pengembangan guru pendidikan Agama Islam telah dilakukan ialah : penataran Peningkatan Wawasan Kependidikan Agama Islam (PWKGAI) di tingkat propinsi yang diselenggarakan oleh pemimpin bagian proyek pembinaan pendidikan pancasila Jawa Barat dan di daerah berdasarkan SK kepala kantor depdikbud Kotamadya Cirebon, mengikuti seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Cirebon dan instansi-instansi lainnya, penataran instruktur pesantren kilat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, melalui pengembangan pribadi dan studi lanjut (program D 3).

Dari hasil penelitian pula ditemukan beberapa permasalahan GPAI sebagai berikut :

- a. Bahwa pengembangan GPAI melalui penataran PWKGAI tingkat propinsi yang nampaknya secara rutin dilaksanakan belum memberikan peluang kepada semua GPAI, sehingga utusan yang diberangkatkan ke penataran hanya orang-orang tertentu saja yang pada akhirnya mereka tidak mampu untuk mentransformasikan pengalamannya ke guru-guru agama yang lain.
- b. Keinginan dari hasil penataran PWKGAI diharapkan dapat terbentuk satu wadah guru yang dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya, namun sampai saat ini wadah seperti MGMP PAI dan KKG belum bisa dimanfaatkan secara maksimal seperti guru bidang studi yang lain dengan alasan faktor dana yang menjadi penghambatnya.
- c. Terdapat pandangan yang berbeda dalam memahami wadah aktivitas guru seperti MGMP tersebut, sehingga menimbulkan persaingan yang kurang sehat di antara GPAI NIP 13 dan GPAI NIP 15.

- d. Merasa tidak punya hubungan dengan kantor Departemen Agama yang secara langsung sebagai pengawas dan pengembangan materi pendidikan agama Islam. Karena mereka (GPAI NIP 13) merasa dibina dan dikembangkan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Kesemua masalah-masalah tersebut di atas nampaknya sebagai akibat dari koordinasi yang kurang mantap antara pengawas PAI, pihak Depag dan Depdikbud dalam proses pengembangan kemampuan profesional GPAI.

B. Implikasi

Pengembangan kemampuan profesional Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) se-Kotamadya Cirebon, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, pengawas PAI, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kandepag Kotamadya Cirebon dan para guru agama yang ber-NIP 13 dan NIP 15 dapat dikatakan kurang baik. Khususnya tentang pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas PAI dan koordinasi antar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Agama Kotamadya Cirebon.

Seorang pekerja profesional perlu dibedakan dari seorang teknisi, keduanya dapat saja tampil dengan

unjuk kerja yang sama, menguasai prosedur kerja yang sama, (misalnya: menguasai teknik kerja yang sama, menguasai prosedur kerja yang sama, dapat memecahkan masalah-masalah teknis dalam bidang kerjanya), tetapi seorang pekerja profesional dituntut mempunyai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan rasional, dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta memperkembangkan mutu karyanya.

Performansi guru dapat dilihat dari pengetahuannya, keterampilannya bertingkah laku dan keterampilan melakukan hubungan. Fakry Gaffar (1987 : 159) membagi performan kriteria guru kedalam tiga bidang besar yaitu (1) *content knowledge*, (2) *behavioral skills*, dan (3) *human relation skills*". Dalam ketiga bidang tersebut guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik melalui pembinaan yang dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan hubungan manusiawi.

Secara konseptual A.S. Lardizabal (1977:6-7) dalam Samana, mengemukakan bahwa "kompetensi keguruan meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Aspek kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial umumnya disatukan". Lebih lanjut A.S. Lardizabal (1977: 7-10) mengemukakan Rincian kompetensi personal- sosial sebagai berikut :

1. Guru menghayati serta mengamalkan nilai hidup (termasuk nilai moral dan keimanan).
2. Guru hendaknya bertindak jujur dan bertanggung jawab.
3. Guru mampu berperan sebagai seorang pemimpin.
4. Guru bersikap bersahabat dan terampil berkomunikasi dengan siapapun demi tujuan yang baik.
5. Guru mampu berperan secara aktif dalam pelestarian pengembangan budaya masyarakat.
6. Dalam persahabatan dengan siapapun, guru tidak kehilangan prinsip serta nilai hidup yang diyakininya.
7. Guru bersedia ikut berperan serta dalam berbagai kegiatan sosial.
8. Guru adalah pribadi yang bermental sehat dan stabil.
9. Guru tampil secara pantas dan rapi.
10. Guru mampu berbuat kreatif dengan penuh perhitungan.
11. Dalam keseluruhan relasi sosial dan profesionalnya, guru hendaknya mampu bertindak tepat waktu dalam janji dalam penyelesaian tugasnya.
12. Guru hendaknya dapat menggunakan waktu luangnya secara bijaksana dan produktif.

Sedangkan kompetensi profesional meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Guru dituntut menguasai bahan ajar.
2. Guru mampu mengelola program belajar mengajar.
3. Guru mampu mengelola kelas.
4. Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran.
5. Guru menguasai landasan-landasan kependidikan.
6. Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar.
7. Guru mampu menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran.
8. Guru mengenal fungsi serta program pelayanan bimbingan dan penyuluhan.

9. Guru mengenal dan mampu ikut menyelenggarakan administrasi sekolah.
10. Guru memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran.

Dari beberapa kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa tuntutan untuk menjadikan suatu pekerjaan profesional dituntut syarat-syarat atau kompetensi. Oteng Sutisna (1993:6) mengatakan bahwa :

Kemampuan untuk memperlihatkan perilaku yang memungkinkan mereka menjalankan tugas kewajiban administratif dengan cara yang paling diinginkan, atau dengan kata lain, orang-orang yang berbuat tidak hanya sekedar menjalankan manajemen pendidikan yang rutin seperti sekarang ini, tetapi untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, produktivitas dan relevansi perbuatan sistem pendidikan. Singkatnya, orang-orang yang mampu memperlihatkan perbuatan profesional yang bermutu.

Dengan demikian, agar guru memenuhi kriteria-kriteria di atas dibutuhkan pengembangan kemampuan profesional melalui pemberian kesempatan mengikuti pembinaan, pembinaan secara rutin dari pengawas pendidikan agama Islam, kordinasi antara kepala sekolah dengan pengawas pendidikan agama Islam dan pengembangan secara mandiri.

Upaya-upaya pengembangan melalui keempat cara tersebut di atas belum dapat dilaksanakan secara efektif, dasar permasalahannya adalah adanya dualisme penge-

lolaan tenaga kependidikan (GPAI NIP 13 dan NIP 15), yakni antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama.

Apabila melihat kondisi fisik dan kelengkapan fasilitas sekolah menengah umum negeri (SMUN) yang ada di Kotamadya DT II Cirebon sebanyak sembilan sekolah menengah umum negeri, hanya satu SMU Negeri yang masih belum mempunyai lokasi gedung, karena baru dibuka tahun ajaran 1996-1997. Dan kesemua SMUN itu mempunyai prioritas pembinaan yang sama, yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pengembangan kemampuan guru pendidikan agama Islam ber-NIP 15 dan NIP 13 adalah seperti berikut ini

1. Peningkatan Jumlah Pengawas PAI.

Jumlah pengawas pendidikan agama Islam yang ada di wilayah Kotamadya DT II sebanyak 3 orang, yang sudah mempunyai wilayah garapannya masing-masing. Pengawas pendidikan agama Islam mempunyai tugas melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas guru agama di bidang bimbingan pengajaran, akhlak, ketrampilan ubudiyah pada sekolah menengah tingkat pertama dan atas, sekolah kejuruan serta melaksanakan supervisi atas pelaksanaan tugas guru agama pada perguruan agama Islam pada tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Oleh karena itu Departemen Agama melalui pengawas mempunyai wewenang hanya untuk mengawa-

si pelaksanaan tugas guru pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Umum (SMU) ber-NIP 13 dan ber-Nip 15.

Peningkatan kuantitas (jumlah) pengawas seyogianya diimbangi dengan kualitas pengawas itu sendiri, Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Barat, yang mempunyai tugas dan wewenang dalam merekrut pengawas hendaknya calon pengawas itu dilihat tentang : pengetahuan (*Knowledge*) yang dimilikinya, keterampilan berhubungan (*interpersonal skills*) dan keterampilan teknis (*technical skills*). Ketiga prasyarat itu merupakan tuntutan mutlak untuk melaksanakan tugas atau kegiatan supervisi pengajaran secara efektif.

Seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya perlu menyusun perencanaan yang matang sebelum ia terjun ke sekolah yang berhubungan dengan pengendalian dan penilaian langsung. Tahapan-tahapan dalam bentuk perencanaan itu antara lain adalah : menetapkan tujuan supervisi pendidikan, menyusun program yang akan disupervisi, menyusun instrumen supervisi, melaksanakan supervisi, mengolah dan menganalisis hasil supervisi, menyusun laporan dan rekomendasi dan mengadakan tindak lanjut berupa tindakan perbaikan yang positif atau peningkatan mutu terhadap sasaran yang akan dicapai.

Oteng Sutisna (1993:279) mengemukakan bahwa " ... kegiatan-kegiatan supervisi harus disusun dalam suatu

program yang merupakan suatu kesatuan yang direncanakan dengan teliti dan ditujukan kepada perbaikan situasi mengajar belajar ". Performan pengawas PAI supaya tidak mendapat respon yang tidak sehat dari para guru agama, maka dalam recrutmennya dilakukan berdasarkan akal sehat dan memahami tentang tugas pokok dari pengawas itu sendiri, Ia adalah orang berperan dan mempunyai tanggung jawab tentang mutu program pengajaran di sekolah yang dibinannya.

Para pengawas (supervisor) adalah merupakan gurunya para guru. Sebagai guru seyogiannya supervisor memiliki kompetensi yang sama dengan guru, hanya bobotnya harus lebih tinggi. Sepuluh tugas supervisor yang harus diperhatikan ialah : mengembangkan kurikulum, mengorganisasi pengajaran, menyiapkan staf pengajar, menyiapkan fasilitas belajar, menyiapkan bahan-bahan pelajaran, menyelenggarakan penataran-penataran guru, memberikan konsultasi dan membina anggota staf pengajar, mengkoordinasi layanan terhadap para siswa, mengembangkan hubungan dengan masyarakat dan menilai pengajaran.

Kesepuluh kompetensi itu, sebagian besar berhubungan dengan kurikulum. Kegiatan-kegiatan penataran dan menyiapkan staf bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru agar supaya bisa memotivasi siswa agar supaya belajar lebih baik.

2. Beberapa Pendekatan dalam Pengembangan Kemampuan Profesional GPAI.

Kegiatan-kegiatan pengembangan kemampuan profesional guru agama Islam yang telah dikemukakan di atas, adalah merupakan kegiatan yang bersifat rutinitas. Kegiatan pengembangan atau pembinaan yang dilakukan secara terprogram dan kontinu merupakan modal utama untuk meningkatkan semangat para guru.

Kegiatan supervisi (pembinaan) akan memiliki fleksibilitas yang tinggi apabila dilakukan sesuai dengan permasalahan para guru, suasana kerja yang kondusif, dan cara pengambilan keputusan yang melibatkan para guru. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sasaran, waktu dan materi yang diterima guru dapat meningkatkan mentalitas guru dalam situasi yang bagaimanapun. Dengan mentalitas kerja yang tinggi, maka tujuan sekolah dan tuntutan masyarakat dapat terpenuhi.

Landasan operasional dalam pengendalian dan pengawasan guru agama di SMU adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 dan penjelasannya, Keputusan Bersama menteri Pendidikan dan kebudayaan dan Menteri Agama. Dalam meningkatkan kemampuan profesional guru agama Islam di SMU antara lain ialah melalui pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas, mengikuti berbagai penataran, diskusi dan seminar pengembangan secara mandiri dan

studi lanjut.

Sebelum sampai pada pembahasan beberapa pendekatan baru dalam pengembangan kemampuan profesional GPAI, terlebih dahulu dikaji kerangka permasalahan dan persepsi pembinaan, cara yang telah dilakukan kemudian dikembangkan cara yang baru yang sesuai dengan latar belakang penyebab belum terlaksananya pembinaan kemampuan profesional GPAI secara efektif.

Berdasarkan alur pikir tersebut, jelaslah bahwa sasaran pengembangan atau pembinaan kemampuan profesional GPAI diharapkan mampu melaksanakan proses belajar mengajar dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

Pengembangan (pembinaan) kemampuan profesional GPAI dimungkinkan adanya keikutsertaan dalam pendidikan, penataran-penataran, seminar-seminar dan fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan nilai tambah untuk mengembangkan kemampuan seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP PAI), Musyawarah Kepala Sekolah (MKS), Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala sekolah dan Pengawas PAI. Agar terlaksana pembinaan kemampuan profesional guru PAI yang efektif, hendaknya pengawas PAI meningkatkan kerjasamanya dengan kepala sekolah, Kasi Pendidikan Agama Islam, Kasi Binmudora dan instansi lain yang terkait dalam

proses pembinaan tersebut, sehingga permasalahan yang dihadapi GPAI khususnya dapat diselesaikan dengan baik.

Sesuai hasil penelitian, untuk pembinaan kemampuan profesional GPAI di SMU se-Kotamadya Cirebon, maka kegiatan supervisi melalui kegiatan pemberian motivasi merupakan program utama. Program ini sangat efisien dan mempunyai daya dukung yang kuat apabila dilakukan secara kekeluargaan dan saling pengertian antara orang yang melakukan supervisi dengan orang yang disupervisi.

Sampai saat ini masih terdapat guru pendidikan agama Islam yang belum memperoleh kesempatan mengikuti penataran baik yang sifatnya penyegaran maupun kualifikasi, adanya sebagian GPAI NIP 13 yang loyalitas terhadap Departemen Agama masih kurang serta sikap pandang terhadap pengawas PAI yang mengarah negatif dan belum mampunya memanfaatkan wadah-wadah organisasi profesi guru secara maksimal, maka untuk mengantisipasi hal-hal seperti di atas, maka perlu pendekatan (cara) baru yang harus dilakukan, antara lain ialah :

- a. Perlunya koordinasi antar instansi terkait (Departemen Agama dengan Kandepdikbud)

Berdasarkan temuan penelitian yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pembinaan kemampuan profesional GPAI adalah kurangnya kordinasi antar in-

stansi terkait. Oteng Sutisna (1993:236) " tanpa koordinasi sulit mengharapkan bahwa pengaturan kegiatan dengan tertib dari dua orang atau lebih dalam mengejar suatu tujuan bersama akan dicapai".

Dengan adanya koordinasi itu diharapkan kegiatan sekolah yang telah diprogramkan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, agar koordinasi tercipta dengan baik harus ada rencana yang matang bagi setiap kelompok, difahami oleh semua personil dan mereka siap untuk menerima dan berbuat rencana itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Oteng Sutisna (1993:237) bahwa proses koordinasi dapat dibagi dalam tiga tingkat.

Pertama, harus ada rencana perilaku yang telah dibuat bagi semua anggota kelompok. *Kedua*, seluruh rencana itu atau sedikitnya bagian-bagiannya yang relevan harus difahami oleh setiap orang yang terlibat. *Ketiga*, kesediaan setiap orang untuk berbuat sesuai dengan rencana harus dikembangkan.

Hal-hal lain yang harus diperhatikan untuk terencanaanya kegiatan koordinasi, antara lain : *Pertama*, adanya kesatuan pemahaman terhadap kegiatan yang akan dikordinasikan. Dalam hal ini, setiap orang, instansi dan lembaga yang terlibat, harus mempunyai persepsi yang sama terhadap kegiatan yang akan dikordinasikan. Dengan persepsi yang sama, maka akan memudahkan bagi setiap personil untuk menentukan langkah-langkah apa yang ditempuh, ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan,

hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan sehingga dapat menentukan cara yang terbaik dilakukan. *Kedua*, penanaman rasa tanggung jawab terhadap tugas pokok. Dalam hal ini, setiap personil hendaknya mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugasnya. Dengan mengetahui tugas yang dibebankan kepadanya dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. *Ketiga*, pemahaman terhadap tujuan koordinasi. Pemahaman tersebut dapat membantu personil untuk mengarahkan dirinya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, menjaga batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya, menjaga kriteria yang telah ditentukan, yang pada akhirnya dapat menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan. *Keempat*, Kemampuan untuk mengendalikan diri yang tinggi. Untuk terlaksananya kegiatan yang baik, setiap personil perlu menjaga batas-batas wewenang dan tugas masing-masing. Dalam mengemukakan masalah hendaknya dengan hati yang dingin, akal yang sehat dan tidak emosional dan harus memperhatikan perasaan personil yang lain. *Kelima*, mempunyai minat untuk menyelesaikan masalah melalui suatu koordinasi. Dengan minat penyelesaian masalah melalui koordinasi akan mendatangkan manfaat yang tinggi. Hal ini, karena masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh pelaksanaan pendidikan, kemungkinan besar ada jalan keluarnya yang lain. *Keenam*,

kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan tegas hasil-hasil kesepakatan dalam bentuk koordinasi. setiap kegiatan yang telah disepakati bersama hendaknya dilakukan secepat mungkin.

b. Mengorganisasi Guru Pendidikan Agama Islam.

Salah satu ide yang diinginkan dari kegiatan penataran Peningkatan wawasan Kependidikan Agama Islam (PWKGAI) ialah terciptanya satu wadah organisasi guru matang pelajaran, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI, namun wadah ini belum dapat dimanfaatkan oleh para guru agama secara maksimal, akibatnya para guru agama terdapat visi yang berbeda dalam memahami wadah tersebut.

Oleh karena itu pengawas PAI dan para pelaksana yang terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut harus mampu mengorganisasi sumber-sumber pendidikan yang tersedia, yakni guru pendidikan agama Islam secara khusus. Mengorganisasi di sini diartikan mengatur, mengkoordinasi dan membina para guru agama Islam agar mereka mau dan dapat bekerja sama, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita pendidikan di tempat mereka bekerja masing-masing. Dengan adanya kegiatan mengorganisasi guru, pengawas akan mengetahui guru agama mana yang mudah atau sulit untuk dibina. Para pengawas harus

mempunyai pengalaman yang lebih untuk mengantisipasi aktivitas-aktivitas yang menyangkut peningkatan mutu guru agama Islam yang akan datang.

Pengawas PAI dalam melaksanakan tugasnya diharapkan meningkatkan motivasi guru agama, oleh karenanya para pengawas PAI hendaknya mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh para GPAI lewat pekerjaannya sehari-hari di sekolah. Made Pidarta (1992:179) mengemukakan " bahwa yang dapat meningkatkan kegiatan guru itu ialah prestasi, penambahan ilmu pengetahuan, pekerjaan terutama yang menantang tanggung jawab dan kemajuan yang diperoleh". Para pengawas PAI hendaknya mempunyai anggapan bahwa setiap guru adalah merupakan pribadi yang berkembang. Bila perkembangan itu dilayani, maka sudah tentu akan lebih terarah dan mempercepat laju perkembangan itu sendiri.

Mengorganisasi guru membutuhkan faktor-faktor pendukung (Made Pidarta, 1992:204) mengemukakan " bahwa faktor-faktor pendukung itu (1) iklim sekolah, (2) proses kenaikan pangkat, (3) kesejahteraan, dan (4) kesempatan belajar lebih lanjut".

Iklim sekolah memegang peranan paling penting, sebab iklim itu menunjukkan suasana kehidupan dan pergaulan di sekolah itu. Kelancaran kenaikan pangkat adalah hal lain yang mendukung keberhasilan mengorgani-

sasi guru. Kepangkatan ini bertalian erat dengan perasaan aman dan puas di kalangan guru-guru yang bekerja di suatu sekolah. Peningkatan kesejahteraan guru merupakan faktor yang penting, adanya kesejahteraan yang memuaskan para guru akan bekerja secara khusus dan tidak akan mencari kerja sambilan yang nantinya akan mempengaruhi terhadap tugas pokok. Dan yang terakhir adalah adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesional, kesempatan peningkatan kemampuan ini melalui penataran, seminar, diskusi dan belajar pada suatu lembaga pendidikan tertentu. Maka GPAI akan dapat mengembangkan sikapnya secara lebih positif terhadap bidang studi yang dipelajarinya.

Bila guru-guru agama telah banyak menerima pendidikan dalam bidangnya masing-masing, yang membuat mereka semakin ahli, diharapkan mereka dapat menghayati makna jabatan guru yang meminta belajar terus. Penghayatan ini yang akhirnya secara perlahan-lahan dapat menumbuhkan rasa cinta pula terhadap pekerjaan mendidik dan mengajar.

c. Pengembangan Kegiatan Supervisi dan Kegiatan Kelompok Kerja GPAI.

Pengembangan kegiatan supervisi di sekolah, khususnya pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam sangat diperlukan. Oleh karena itu,

supervisi hendaknya dilakukan secara kontinu dan terprogram. Hal ini mengingat guru sebagai manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan dan permasalahan pribadi. Karena perkembangan teknologi, informasi dan tuntutan masyarakat, guru agama diharapkan melaksanakan tugas secara profesional. Pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas PAI melalui kegiatan pembinaan potensi GPAI, bimbingan, saran, teguran, dialog atau diskusi.

Begitu juga kegiatan pengembangan kelompok kerja guru agama perlu dikembangkan, mengingat kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan pengetahuan dan keterampilan guru. Dengan demikian permasalahan-permasalahan yang dihadapi GPAI khususnya dalam pelaksanaan tugas dapat diatasi dan dapat menumbuhkan pula tekad dan niat untuk melakukan berbagai kegiatan. Secara tidak langsung kegiatan itu dapat membantu mereka dalam kelancaran tugas. Akhirnya akan melahirkan GPAI yang memiliki kemampuan profesional.

C. Rekomendasi

Pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam dapat dijadikan kajian yang bermakna untuk menghasilkan model pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam yang sesuai dengan situasi

dan kondisi lingkungannya. Model ini penulis sajikan dalam rekomendasi dengan harapan akan ditindak lanjuti oleh instansi-instansi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya. Model-model tersebut antara lain seperti berikut ini :

1. Teknis pengangkatan pengawas PAI.

Proses pengangkatan pengawas PAI berlaku sama dengan proses penerimaan para pegawai atau karyawan baru, yakni calon pengawas ini diterima melalui proses seleksi dan kriteria penerimaan ditentukan seperti tentang batas umur, pendidikan minimum, kepribadian, kepemimpinan, kemampuan umum, keterampilan dan pengalaman. Khusus untuk kriteria pengawas pendidikan agama Islam harus ditambahkan kemampuan dan keterampilan khusus yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian instrumen disiapkan sesuai dengan kriterium masing-masing lalu ditentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam seleksi itu dan perlu dipikirkan bentuk pengembangan atau pendidikan pengawas (supervisor).

2. Kuantitas dan Kualitas Pengawas

Pengawas PAI Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat yang ditugaskan di Kotamadya Cirebon yang sampai penelitian ini dilakukan berjumlah tiga orang nampaknya sangat perlu pemberdayaan yang

lebih maksimal. Sehubungan dengan hal ini terdapat tiga pola pemberdayaan pengawas PAI khususnya, yaitu *Preservice (Pendidikan formal)*, *Inservice (Penataran)* dan *on the job training (pendidikan dalam jabatan)*.

Pendidikan formal dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk membentuk calon-calon pengawas. penataran diberikan kepada calon pengawas yang sudah diterima atau kepada para pengawas yang bertugas untuk memantapkan dan meningkatkan profesinya. Sedangkan pendidikan dalam pekerjaan ialah usaha meningkatkan profesi para pengawas dengan latihan-latihan pada waktu dan ditempat mereka bekerja.

Ketiga pola pendidikan tersebut dapat diambil strategi sebagai berikut : Untuk jangka waktu pendek dalam arti mengangkat pengawas dengan jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat, dapat ditempuh pola penataran untuk memantapkan dan meningkatkan profesi mereka. Untuk jangka waktu panjang perlu dipikirkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang mana patut disertai kewajiban mempersiapkan calon-calon pengawas itu.

3. Koordinasi dalam peningkatan melalui forum MGMP PAI.

Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) hendaknya lebih difungsikan lagi sehingga para GPAI mempunyai persepsi yang sama dan mampu membawa misi pendidikan agama Islam. Implementasi pendidikan agama Islam memerlukan koordinasi yang lebih mantap antara Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah dan para guru agama. Tanpa koordinasi sulit untuk mengharapkan bahwa kegiatan itu akan tertib dan mencapai tujuan. Proses koordinasi bisa dibagi dalam tiga tingkat:

(1) harus ada rencana peri laku yang telah dibuat bagi semua anggota kelompok, (2) seluruh rencana itu atau sedikitnya bagian-bagiannya harus difahami oleh setiap orang yang terlibat, (3) kesediaan setiap orang untuk berbuat sesuai dengan rencana yang harus dikembangkan (Oteng Sutisna, 1993:237).

Forum MGMP PAI sudah semestinya memperhatikan fungsi-fungsi administrasi dan koordinasi hendaknya tidak dipandang sebagai suatu kegiatan yang terpisah dan berdiri sendiri.